

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Himawan. *Pokok-Pokok Reformasi Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003.
- *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996.
- Basyaril, Salim *Reformasi Administrasi dan Birokrasi Peradilan*, Penerbit FHUI, Jakarta. 2005.
- Effendi, M. Arief. *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi*. Salemba Empat, Jakarta. 2008.
- Kaihatu, Thomas S. *Good Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta 2006
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Salam, Mochammad Faisal. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001
- Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2008.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.
- *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.